



KEBANGSAAN
INDONESIA:
Reaktualisasi
Nasionalisme
dalam
Menyongsong
Abad XXI

■ Rizal Mustansyir

Manusia adalah mahluk sosial yang memiliki hasrat hidup berkelompok. Hasrat itu didorong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yaitu, mengatasi persoalan hidup secara bersama-sama. Konflik termasuk salah satu persoalan hidup yang menghantui kehidupan manusia, sehingga diperlukan pemecahan yang tepat untuk mengatasi hal itu. Rasa kebersamaan yang kemudian mengejawantah ke dalam semangat persatuan bangsa merupakan alternatif terbaik untuk mengatasi konflik. Namun selalu muncul persoalan-persoalan baru yang menyebabkan timbulnya konflik-konflik baru, demikian seterusnya, sehingga konsep persatuan bangsa dituntut untuk fleksibel agar dapat mengantisipasi persoalan yang berkembang di masyarakat.

Berbagai kerusuhan yang terjadi di Indonesia ini pada tahun 1997 menimbulkan rasa keprihatinan yang mendalam, terlebih bila dilihat dari kacamata wawasan kebangsaan. Mulai dari kerusuhan yang berbau rasial seperti di Singkawang, Kalimantan Barat sampai kerusuhan yang berbau politik seperti yang terjadi di Pekalongan, Banjarmasin, dan Sampang pada masa Pemilu. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa nasionalisme di Indonesia sedang menghadapi tantangan yang sangat berat. Rasa kebersamaan mulai luluh dalam sentimen pribadi, kesukuan, keagamaan. Oleh karena itu konsep persatuan bangsa perlu direinterpretasi untuk memperoleh suatu wawasan kebangsaan yang baru, yang sesuai dengan perkembangan jaman.

Banyak pemerhati yang menuding kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, ketertutupan politik, arogansi kekuasaan sebagai pemicu timbulnya konflik di Indonesia. Tudingan semacam ini tidak seluruhnya keliru, manakala kita mengamati fenomena kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara yang menunjukkan tendensi ke arah perilaku-perilaku sosial semacam itu. Namun tudingan saja tidak menyelesaikan masalah, perlu dicari alternatif baru untuk merumuskan kembali wawasan kebangsaan yang mampu mewadahi segala aspirasi masyarakat, sekaligus menyalurkan berbagai aspirasi itu dalam suatu kebijakan (policy) yang dapat dipertanggungjawabkan secara total. Inilah kiranya yang akan mendapat perhatian dalam tulisan ini.

Konsep Persatuan Bangsa

Persatuan bangsa merupakan kata kunci untuk memahami nasionalisme. Persatuan bangsa adalah sebuah proses dinamik suatu bangsa dengan bertitik tolak dari cara pandang bangsa yang bersangkutan dalam memahami realitas yang dihadapi. Oleh karena itu sesungguhnya persatuan lebih mengacu pada semangat atau tekad untuk mengatasi perbedaan yang rawan terhadap konflik, mencari kesamaan yang dapat dijadikan titik pijak dalam mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Semangat persatuan itu sendiri senantiasa mengacu pada faktor historik, yang menjadi asal mula munculnya kesadaran untuk bersatu. Sejarah perjuangan dan pergerakan bangsa Indonesia selama ratusan tahun merupakan sumber acuan yang tidak pernah kering bagi pemahaman terhadap persatuan bangsa. Sejarah memperlihatkan bahwa keterpecahan merupakan suatu titik kelemahan yang dapat merugikan suatu bangsa. Keterpecahan itu pula yang menjadikan bangsa Indonesia dijajah sekian lama oleh bangsa asing (Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang).

Persatuan adalah suatu proses yang terjadi dalam diri manusia, terutama rasa dan semangat untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang dikhawatirkan menimbulkan konflik. Pengalaman hidup menunjukkan bahwa perbedaan sesuatu yang bersifat alamiah, namun perlu diatasi agar tidak menimbulkan perpecahan antar manusia. Semangat untuk mengatasi perbedaan dan menggalang cita-cita serta tujuan bersama ini dinamakan persatuan. Pokok pikiran pertama sebagaimana termuat dalam Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 menyatakan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Dalam hal ini diterima pengertian negara persatuan, yaitu negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa. Negara persatuan ini mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan. Semangat persatuan ini pula yang mewarnai pemikiran Soepomo ketika melontarkan gagasan tentang negara integralistik, yaitu suatu negara yang bersifat kekeluargaan dengan mengatasi paham golongan atau perseorangan. Soepomo menyatakan bahwa dalam suasana persatuan antara rakyat dan pemimpinnya, antara golongan-

golongan rakyat satu sama lain, segala golongan tersebut diliputi oleh semangat gotong royong, semangat kekeluargaan. Faham yang demikian ini mengungkapkan konsep totalitas. Faham totalitas ini di setiap budaya, mengungkapkan diri melalui cara yang khas, berbeda dalam budaya yang satu dari budaya yang lain. Ia mengakar di dalam sifat kodrati manusia. Sesungguhnya dimana-mana dapat ditemukan kesadaran akan kesatuan yang menyeluruh, yang di dalamnya manusia hidup dan bergerak, suatu kesadaran akan adanya serba hubungan, sehingga manusia merasa berada dalam rumahnya sendiri, baik yang dialaminya secara sadar maupun tidak.

Sartono (1990: 33-34) secara tegas menunjukkan betapa pentingnya fenomena kesatuan, karena fenomena kesatuan pada hakikatnya mencakup pula proses integrasi atau unifikasi sebagai faktor pembentuknya. Kesatuan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang menunjuk kepada integrasi fungsional, sedang kesatuan sebagai produk dari proses pertumbuhan mengandung proses integrasi historis. Dalam kasus kita mengenai integrasi nasional, kita dapat memandangnya juga sebagai integrasi teleofungsional, oleh karena proses integrasi di sini diarahkan untuk memadukan berbagai unsur dengan tujuan menciptakan harmoni sosial dalam masyarakat Indonesia sebagai faktor penopang kehidupan kita sebagai nasion.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multi-etnik, multi-religi dan multi-kepulauan. Keanekaan itu merupakan kodrat alami yang telah diterima begitu saja secara bulat oleh bangsa Indonesia sebagai suatu realitas. Keanekaan sebagai problem intern tersebut masih ditambah dengan keanekaan sebagai problem ekstern. Kemajuan IPTEK, terutama teknologi komunikasi dan informasi membuka sekat-sekat suatu bangsa untuk berhadapan secara transparan dengan bangsa-bangsa lain. Prof. Koesnadi menunjukkan ancaman yang timbul di era globalisasi ini berupa ketidaksiapan generasi muda kita dalam bersaing dengan tenaga kerja asing, karena rendahnya etos kerja di kalangan generasi muda kita (Jurnal Pusat Studi Pancasila Seri I, 1997).

Era keterbukaan itu di satu pihak berdampak positif, di pihak lain berdampak negatif. Dampak positifnya adalah

perkembangan bangsa ke arah kemajuan nyata (berupa: pembangunan di segala bidang), karena adanya arus informasi dan komunikasi menjadikan hubungan antar bangsa menjadi intens. Dampak negatifnya adalah pertemuan berbagai arus budaya membuat masyarakat menerima berbagai informasi, sehingga manusia moderen menurut istilah Alwi Dahlan -- sebagaimana dikutip oleh Soeprapto (1995:11)-- dilanda oleh kecemasan informasi. Informasi ini ada yang sesuai ada pula yang tidak sesuai dengan pola budaya bangsa yang bersangkutan. Ketidaksesuaian (discrepancy) ini dapat menimbulkan kebingungan bahkan keterpecahbelahan di kalangan masyarakat.

Wawasan kebangsaan pun mengalami perkembangan --sebagaimana yang disinyalir oleh John Naisbitt & Patricia Abuderne, dalam *Megatrends 2000*-- bahwasanya dunia sekarang ini makin menjadi kosmopolitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Gaya hidup bersama makin menyatu, makin tampak bangkitnya kontra-trend yang kuat, yaitu trend yang menentang uniformitas, yakni suatu keinginan untuk mempertahankan dan memperkuat kebudayaan dengan kekhasannya. Kalau Nasionalisme budaya ditentang, maka ia akan bangkit kembali manakala datang kesempatan (Roeslan Abdulgani:1994).

Situasi di atas memperlihatkan betapa pentingnya pengkajian ulang atas makna kesatuan dan persatuan, sehingga nasionalisme tidak diberi interpretasi makna yang sempit, namun juga tidak dimasuki sembarang pengertian yang dapat menghilangkan identitas bangsa itu sendiri.

Keanekaragaman Sebagai Kenyataan Konkret

Istilah Keanekaragaman setara artinya dengan Plurality dan pluriformity. Plurality dalam Longman Dictionary of Contemporary English (1987: 792) artinya the state of being plural, bentuk jamak atau majemuk. Istilah pluriformity terambil dari akar kata bahasa latin pluriformis, yang berarti pelbagai, macam, warna-warni, bervariasi (Prent, dkk, 1969: 650). Jadi ada kedekatan antara arti yang dikandung dalam istilah plurality dan pluriformity, keduanya mengacu pada keanekaan, kepelbagaian, keanekaragaman, kemajemukan

yang ditemukan dalam realitas. Dagobert D. Runes (1979: 221) menyatakan, bahwa pluralisme itu suatu pandangan yang menganggap kenyataan itu terdiri atas lebih dari satu kenyataan yang azali. Paul Edwards (1971: 444) menyatakan bahwa Empedocles (490 - 430 SM) sebagai tokoh pluralisme pertama, karena Empedocles mengajukan ucapan yang jelas tentang empat unsur, yakni api, udara, air dan tanah sebagai dasar yang paling pokok dari segala sesuatu. Keempat unsur tersebut tidak sama dan tidak dapat dihancurkan. Segala sesuatu di alam ini berasal dan dihasilkan oleh perpaduan dan pemisahan dari keempat unsur tersebut. Bakker menunjuk tokoh-tokoh lain seperti: Demokritos, Malebranche, Leibniz sebagai penganut pluralisme. Demokritos (493-404 SM) menganggap seluruh kenyataan terdiri dari unsur-unsur yang tidak terbagikan (atomos). Atom-atom itu begitu kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan jumlah yang tidak berhingga. Malebranche (1638-1715) menganggap substansi-substansi semua terisolasi satu sama lain, tanpa dapat saling berpengaruh baik yang spiritual maupun material. Semua bersifat pasif. Namun pada penciptaan dunia, Tuhan menyediakan sejumlah gerak yang dibagi-bagikan kepada semua substansi. Terjadinya gerak itu dalam substansi-substansi, memberikan kesempatan (occasio) bagi Tuhan agar bertindak terhadap substansi lainnya. Leibniz (1646-1716) menganggap bahwa kenyataan pada dasarnya terdiri dari pusat-pusat berdaya dan titik-titik kesadaran (monadisme; monas berarti pusat tertutup). Monade-monade itu tidak berkeluasan; tidak terbagikan, tidak dapat mati. Mereka tidak saling berpengaruh, tetapi merupakan pusat tertutup dengan daya berkembang sendiri (Bakker, 1992: 30-32). Kata monas itu sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yang artinya satu dan tidak terbagi, pengertian satu, kesatuan, bilangan satu. Monas dalam nama sifat berarti sendirian, kesepian (alone, lonely).

Ewing mengidentifikasi pandangan yang bercorak pluralistik dan menghadapkannya dengan pandangan yang bercorak monistik. Isu antara determinisme dan indeterminisme merupakan salah satu isu yang membedakan juga antara jenis pandangan filsafati monistik dengan

pluralistik. Tak ada definisi yang tepat yang dapat menggambarkan kedua pandangan filsafati tersebut, perbedaan antara keduanya terletak pada tingkat keberadaan materi; sehingga kita dapat mengatakan bahwa seorang monist adalah orang yang sangat menekankan pada unsur kesatuan dalam alam semesta, sedangkan seorang pluralist lebih menekankan pada unsur yang beragam. Pada umumnya seorang monist cenderung menekankan keseluruhan pada eksek individual dan spontanitas; sedangkan seorang pluralist cenderung berpandangan sebaliknya (Ewing, 1962: 221).

Namun Ewing pun menyadari bahwa perbedaan diantara kedua pandangan itu tidak bersifat mutlak, melainkan hanya dapat diidentifikasi ciri-ciri yang melekat pada kedua pandangan tersebut. Pluralisme ini pada umumnya dianut oleh empirisisme, realisme dan pragmatisme, karena senantiasa memberikan tekanan pada sifat dasar yang bermacam-macam dari pengalaman. Pluralisme memiliki keunggulan dalam hal-hal yang bersifat praktis-pragmatis, dekat dengan problem konkret, karena memang diangkat dari pengalaman konkret. Pluralisme lebih menekankan pada perbedaan-perbedaan daripada kesamaan-kesamaan. Seorang penganut pluralis cenderung menjadi seorang indeterminis. Seorang penganut pluralis menganggap bahwa alam ini terbentuk dari sejumlah entitas, yang tidak saling berhubungan (disconnected) dan tidak terikat satu sama lain, sehingga masing-masing entitas itu dipandang eksis (Ewing, 1962: 221).

Keanekaan sebagai kenyataan konkret bangsa Indonesia terlihat dalam berbagai dimensi seperti: geografis, budaya (bahasa, adat istiadat, kesenian, agama). Kondisi geografis negara Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas 17.667 buah pulau besar dan kecil, 300 kelompok etnis dan lebih daripada 250 bahasa yang berbeda satu sama lain (Eka Dharmaputera, 1992: 21). Sartono menengarai keanekaan bangsa Indonesia ini yang diwarnai pluralisme kultur etnis dengan 18 lingkungan adat, 250 bahasa daerah, keanekaragaman sistem kekerabatan, gaya arsitektur, pertunjukan rakyat tradisional, kesemuanya adalah produk dari kegiatan etnis, esthetis dan ideasional seperti yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa

Indonesia. Baik nilai-nilai kultural maupun lembaga-lembaga sosial telah terbentuk dalam kehidupan sosio-historis bangsa di masa lampau (1990: 35).

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk, dengan latar belakang berbagai kebudayaan daerah, yang terikat dalam sebuah kesatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu, meskipun bangsa dan negara Indonesia itu terdiri dari beranekaragam suku bangsa dengan adat istiadat, kebudayaan dan agama yang bermacam-macam, serta beranekaragam kepulauan wilayah negara Indonesia, namun keseluruhannya itu merupakan suatu kesatuan yaitu, bangsa dan negara Indonesia.

Keanekaragaman budaya adalah salah satu ciri yang paling menonjol dalam kehidupan bangsa Indonesia. Proses kehidupan berbangsa dan bernegara itu, secara alamiah menjadikan unsur-unsur kebudayaan daerah menyatu ke dalam kebudayaan nasional. Proses alamiah ini berarti bahwa proses penyatuan unsur-unsur kebudayaan daerah berjalan secara wajar, tanpa campur tangan dan paksaan. Sebuah proses seleksi alamiah, menjadikan unsur-unsur kebudayaan daerah mencerminkan cita-cita dan kehendak masyarakat Indonesia secara *de facto*, menjadi unsur kebudayaan nasional (Jujun S, 1987: 47).

Kendatipun keanekaan merupakan kenyataan konkret yang tak terbantahkan, namun kesadaran manusia menuntut sesuatu yang lain. Tuntutan akan sesuatu yang lain itu sangat tergantung pada tantangan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Semangat persatuan dan kesatuan tidaklah muncul begitu saja secara spontan, melainkan melalui proses panjang perjalanan sejarah. Rasa persatuan yang tumbuh di kalangan para mahasiswa yang berada di bawah panji organisasi Perhimpunan Indonesia, termasuk salah satu contoh kecil, di mana rasa senasib-sepenanggungan dapat menjadi tali pengikat yang kuat ke arah persatuan (Ingleson, 1993: 5). Soerjanto (1994: 22) menegaskan, bahwa setiap negara atau bangsa menunjukkan sikap yang berbeda-beda. Kesemuanya tergantung pada local genius yang mereka pupuk dan ketahanan bangsa yang mereka bangun, untuk menghadapi

segala tantangan secara bijaksana. Demikian pula halnya dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri bangsa Indonesia, walaupun kemunculan pada awalnya digerakkan oleh sekelompok kecil pemuda yang bernaung di bawah organisasi pergerakan, namun mampu membakar api semangat nasionalisme yang secara kodrati berada dalam lubuk hati setiap insan.

Driyarkara (tt: 17) menjelaskan bahwa tanah air sebagai prinsip adaku merupakan titik tolak bagi timbulnya rasa kebangsaan. Kebangsaan adalah suatu cara dari ada-bersama (Mitsein). Ada-bersama berarti upaya membangun kelompok atas dasar berbagai faktor seperti: macam-macam kejadian dalam sejarah, aksi dan reaksi bersama yang terus-menerus terhadap penjajahan bangsa asing, nasib bersama, dan lain-lain. Bangsa adalah kesatuan kultural, kesatuan ekonomis, kesatuan geografis, kesatuan sejarah. Kehidupan bernegara berarti mengembangkan semua kesatuan tersebut.

Daoed Joesoef (1987: 18-20) menganalisis rasa kebangsaan itu dengan bertitik tolak dari pembagian tiga jenis tanah air. Pertama tanah air real, yaitu bumi tempat orang dilahir dan dibesarkan, bersuka dan berduka, yang dialami secara fisik dalam kehidupan sehari-hari. Kedua tanah air formal, yaitu negara bangsa (nation state) yang berundang-undang dasar, tempat kita berkedudukan sebagai warga negaranya. Ketiga, tanah air mental, yaitu tidak bersifat teritorial, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, namun lebih berupa imajinasi yang dibentuk dan dibina oleh ideologi atau seperangkat gagasan vital, hal mana terpenuhi dalam Pancasila. Ikrar Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928, menurut Daoed Joesoef, merupakan pilihan kesatuan wilayah (bertanah air satu), kesatuan politik (berbangsa satu), kesatuan budaya (menjunjung bahasa persatuan). Ikrar yang serba menyatu ini, selain untuk mengimbangi dampak negatif dari keadaan alami yang serba majemuk dari tanah air real, sekaligus merupakan benih perwujudan tanah air formal dan tanah air mental. Keadaan ideal bagi bangsa Indonesia adalah penyatuan ketiga jenis tanah air tersebut dalam rangka mengembangkan semangat kebangsaan.

Beberapa Ancaman Terhadap Nasionalisme

Sebagaimana yang telah ditengarai di dalam Pengantar bahwa rasa Kebangsaan Indonesia dewasa ini menghadapi tantangan yang cukup kuat. Tantangan itu secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian besar, yaitu tantangan dari luar dan tantangan dari dalam. Tantangan dari luar terutama didorong oleh era keterbukaan yang menjadikan bangsa Indonesia ibarat makan buah simalakama, tidak mengikuti perkembangan berarti menghambat kemajuan bangsa, hendak mengikuti perkembangan namun sumber daya manusianya belum siap untuk bersaing dengan bangsa lain. Pengaruh politik, budaya, ekonomi dari luar terhadap kehidupan bangsa Indonesia sudah tak terbendung lagi. Penetrasi itu ibarat virus yang masuk ke berbagai pembuluh darah, siap menyerang organ tubuh yang paling vital, manakala bangsa Indonesia tidak memiliki daya tangkal yang tangguh.

Pengaruh politik tampak jelas dari arogansi negara adikuasa seperti Amerika yang selalu mengatasmakan HAM (Hak-hak Asasi Manusia) ketika menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia. Pembelian pesawat terbang saja --yang bertendensi ekonomis-- dapat dibatalkan manakala konsumen (bangsa Indonesia) tidak mampu menunjukkan itikad baik politiknya (political will) kepada negara produsen (Amerika) dalam persoalan HAM. Namun di pihak lain negara-negara berkembang --termasuk Indonesia-- acapkali menolak konsep universalisme HAM dengan alasan tidak sesuai dengan budaya setempat. Di sini timbul problem dikotomis antara universalisme budaya dan relativisme budaya. Konsep universalisme budaya lebih didasarkan pada keadaan alamiah manusia yang terdapat pada semua manusia di dunia, sedangkan relativisme budaya lebih melihat pada cara operasionalisasi konsep HAM setelah disesuaikan dengan budaya setempat (Tommy Awuy, 1997: 8).

Pengaruh ekonomi terlihat pada peran investor asing dalam penanaman modalnya di Indonesia. Berbagai sumber daya alam (natural resources) di Indonesia diolah secara optimal dengan menyertakan para investor asing, sehingga

kekayaan alam bangsa Indonesia banyak yang terangkut ke luar negeri. Pengusaha-pengusaha Indonesia sendiri belum memiliki daya saing tinggi terhadap investor asing, sehingga ketergantungan pada investor asing belum teratasi.

Pengaruh budaya lebih banyak masuk melalui jalur informasi seperti: radio, televisi, koran, majalah, internet, dan berbagai mass media lainnya. Penyaringannya jauh lebih sulit, karena masyarakat Indonesia sendiri memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap berbagai informasi.

Tantangan dari dalam nyaris timbul sebagai efek tantangan dari luar. Sebagian kecil masyarakat --terutama kalangan intelektual-- memiliki kekayaan informasi yang mempunyai (access) pengaruh cukup kuat di masyarakat luas. Penyebaran informasi yang beranekaragam menimbulkan kegamangan dalam masyarakat, sehingga mereka mudah terpancing pada isu-isu kecil sekali pun. Situasi dan kondisi yang ada semakin mendukung pecahnya kerusuhan, yakni: pengangguran, penghasilan yang kecil, kesewenang--wenangan pengusaha terhadap karyawan, ketidakadilan hukum, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan akumulasi persoalan yang mengandung sensitivitas daya ledak kemarahan yang tinggi, berupa amuk massa.

Inilah kenyataan yang harus mendapat perhatian besar bagi bangsa Indonesia, terutama para penentu kebijakan dalam menjaga semangat kebangsaan Indonesia.

Kesatuan Sebagai Kekuatan Bangsa Indonesia

Pengertian kesatuan (Unity) dalam Longman Dictionary of Contemporary English (1987: 1155) mengacu pada tiga arti. Arti pertama, yaitu bentuk ada yang disatukan atau digabungkan; atau persetujuan bersama. Arti kedua, yaitu keseluruhan sesuatu yang tunggal yang terbentuk dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Arti Ketiga yaitu, menunjuk pada bilangan satu.

Paham filsafat yang menekankan pada kesatuan dinamakan Monisme. Monisme dalam sejarah perkembangan filsafat Barat, mengandung dua pengertian yakni pengertian metafisik dan epistemologik. Monisme dalam pengertian metafisik artinya pandangan yang menganggap hanya ada satu

kenyataan fundamental dalam realitas. Monisme dalam pengertian epistemologik adalah pandangan yang menganggap bahwa objek dan ide yang riil (persepsi atau konsepsi) hanya ada satu dalam relasi pengetahuan contohnya: New Realisme (Runes, 1979:201).

Monisme ini dianut oleh idealisme, materialisme, rasionalisme, vitalisme dan psiko-monisme, yang memberikan tekanan pada sifat dasar yang satu, yang mendasari substansi atau kenyataan. Monisme memiliki keistimewaan dalam hal abstraksi dan daya pengikat dan perekat (kohesi) untuk menyatukan bagian-bagian yang saling terpisah, menjadi suatu kesatuan dengan menemukan titik-titik kesamaan. Monisme lebih menaruh perhatian pada aspek kesamaan daripada aspek perbedaan. Seorang penganut monis berkecenderungan menjadi seorang determinis, karena ia akan cenderung menekankan segalanya dengan mengorbankan sikap individual, seperti: spontanitas (Ewing, 1962: 221).

Plato melihat bahwa kesatuan dan keanekaragaman terpisah menjadi dua dunia, yakni dunia ide dan dunia bayang-bayang. Dunia real dengan kejamakan atau keanekaragaman hanya merupakan dunia bayangan, sedangkan yang benar-benar ada dan menjamin kesatuan ialah dunia ide. Dunia ide itu tersusun secara hirarkhis di bawah pimpinan ide utama, yaitu, ide kebaikan. Idea kebaikan sebagai ide tertinggi merupakan kesadaran tertinggi manusia, termasuk bangsa Indonesia yang beranekaragam untuk mencapai titik keseimbangan atau titik ideal, yakni kesatuan dan persatuan bangsa.

Masyarakat Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk, dengan latar belakang berbagai kebudayaan daerah, yang terikat dalam sebuah kesatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Makna Bhinneka Tunggal Ika yaitu, meskipun bangsa dan negara Indonesia itu terdiri dari beranekaragam suku bangsa dengan adat istiadat, kebudayaan dan agama yang bermacam-macam, serta beranekaragam kepulauan wilayah negara Indonesia, namun keseluruhannya itu merupakan suatu kesatuan yaitu, bangsa dan negara Indonesia.

Keanekaragaman budaya sebagai salah satu ciri yang paling menonjol dalam kehidupan bangsa Indonesia. Proses

kehidupan berbangsa dan bernegara itu, secara alamiah menjadikan unsur-unsur kebudayaan daerah menyatu ke dalam kebudayaan nasional. Proses alamiah ini berarti bahwa proses penyatuan unsur-unsur kebudayaan daerah berjalan secara wajar, tanpa campur tangan dan paksaan. Sebuah proses seleksi alamiah, menjadikan unsur-unsur kebudayaan daerah mencerminkan cita-cita dan kehendak masyarakat Indonesia secara de facto, menjadi unsur kebudayaan nasional (Jujun S, 1987: 47).

Kendatipun keanekaan merupakan kenyataan konkret yang tak terbantahkan, namun kesadaran manusia menuntut sesuatu yang lain. Tuntutan akan sesuatu yang lain itu sangat tergantung pada tantangan yang dihadapi oleh manusia itu sendiri. Semangat persatuan dan kesatuan tidaklah muncul begitu saja secara spontan, melainkan melalui proses panjang perjalanan sejarah. Rasa persatuan yang tumbuh di kalangan para mahasiswa yang berada di bawah panji organisasi Perhimpunan Indonesia, termasuk salah satu contoh kecil, di mana rasa senasib-sepenanggungan dapat menjadi tali pengikat yang kuat ke arah persatuan (Ingleson, 1993: 5). Soerjanto (1994: 22) menegaskan, bahwa setiap negara atau bangsa menunjukkan sikap yang berbeda-beda. Kesemuanya tergantung pada local genius yang mereka pupuk dan ketahanan bangsa yang mereka bangun, untuk menghadapi segala tantangan secara bijaksana. Demikian pula halnya dengan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri bangsa Indonesia, walaupun kemunculan pada awalnya digerakkan oleh sekelompok kecil pemuda yang bernaung di bawah organisasi pergerakan, namun mampu membakar api semangat nasionalisme yang secara kodrati berada dalam lubuk hati setiap insan.

Nasionalisme merupakan kunci menuju ke arah kesatuan dan persatuan bangsa. Keanekaragaman etnis, bahasa, dan agama ditampung dalam semangat kebersamaan, yakni nasionalisme. Sartono Kartodirdjo (1994: 16) menunjukkan beberapa prinsip nasionalisme, yaitu :

(1) Kesatuan (Unity), dalam arti kesatuan ini dinyatakan sebagai *Conditio sine qua non*, syarat yang tak dapat ditolak bagi perjuangan kemerdekaan dan kemudian

sebagai kondisi eksistensi bangsa Indonesia. Salah satu cara untuk mempertahankan kesatuan itu ialah, diperlukannya suatu bentuk solidaritas yang mampu mentransendensi pluralisme (sebagai faham ekstrim) dalam berbagai dimensinya.

(2) Kebebasan (Liberty), dalam arti masyarakat atau warganegara memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat demi terciptanya iklim demokrasi yang kondusif.

(3) Kesamaan (Equity), dalam arti kesamaan hak dan kewajiban serta kesamaan memperoleh kesempatan seperti: pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Kesamaan yang demikian itu mengandaikan adanya peluang bagi setiap warganegara untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing.

(4) Kepribadian (Personality), dalam arti setiap bangsa dengan pengalamannya bereksistensi sudah selazimnya mengembangkan karakteristik tertentu, sehingga ada yang disebut dengan istilah "kepribadian bangsa" (national character), artinya seperangkat ciri yang telah melekat pada suatu bangsa, sehingga dapat membedakannya dengan bangsa lain.

(5) Prestasi (Performance), dalam arti nilai atau kualitas yang diperlihatkan dalam suatu tindakan, sehingga menimbulkan kekaguman pada bangsa lain.

Para pendiri negara melihat pluralisme dalam hal paham, agama, suku, ras yang mendiami Nusantara yang luas ini, maka mereka menyadari perlunya suatu bahan semen perekat untuk menunjang berdirinya dan berkelanjutannya negara kebangsaan dan persatuan yang berkedaulatan rakyat itu. Bahan perekat itu adalah Pancasila.

Pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan anggota-anggota BPUPKI menegaskan pentingnya nasionalisme, sehingga oleh Soekarno diletakkan pada sila pertama (Yamin, 1959: 77). Bangsa, ujar Soekarno mengutip pandangan Ernest Renan, ialah "kehendak akan bersatu". Orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu, ataupun pendapat Otto Bauer yang menganggap bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persamaan nasib. Namun menurut Soekarno, pendapat Renan dan Otto Bauer tentang bangsa itu hanya melihat pada orangnya. Mereka

hanya memikirkan Gemeinschaftnya dan perasaan orangnya, L'ame et le desir. Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat atau bumi yang didiami manusia itu. Soekarno mengajukan konsep geopolitik yang menganggap tempat atau bumi atau tanah air, itu justeru yang perlu diketengahkan dalam konsep bangsa (Yamin, 1959: 69 - 70). Jadi ada tiga faktor penting yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk membina persatuan bangsa, yaitu: (a) kehendak akan bersatu, (b) persatuan perangai karena persamaan nasib, (c) kesamaan geografis.

Nasionalisme Indonesia dalam perspektif Pancasila menghilangkan penonjolan kesukuan, keturunan ataupun perbedaan warna kulit. Sebab rasa kebangsaan itu dibuhul tali persaudaraan yang kuat, adanya rasa senasib sepenanggungan, yang timbul karena proses alami pada era penjajahan. Namun paham kebangsaan yang dianjurkan pendiri negara bukan kebangsaan yang menyendiri (Chauvinisme), yaitu suatu paham yang menganggap hanya bangsanya yang paling mulia dan tertinggi di atas dunia, sedang bangsa-bangsa lain tidak ada harganya (Yamin, 1959: 73).

Koento Wibisono (1987: 38) menegaskan bahwa perumusan formal sila-sila Pancasila, pada hakikatnya merupakan suatu sistimatisasi pandangan hidup bangsa Indonesia akan keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, kepada siapa kita semua bertaqwa; keyakinan bahwa kita sebagai makhluk ciptaanNya dikaruniai harkat dan martabat yang sama; keyakinan bahwa dalam penghayatan hidup kita terdapat unsur-unsur yang khas, yang melahirkan adanya keterikatan sebagai satu kelompok (yaitu bangsa); keyakinan bahwa dalam kehidupan kelompok itu segala sesuatu perlu dirembug dan dipatuhi bersama, demi tercapainya keadilan, dalam arti masing-masing pihak memiliki apa-apa yang memang menjadi haknya.

Hardono Hadi (1994: 88) melihat bahwa kunci pemahaman ke arah kesatuan terletak pada Bhinneka Tunggal Ika. "Bhinneka Tunggal Ika" dimaksudkan sebagai semboyan atau pernyataan jiwa dan semangat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi kesatuan, meskipun negara dan bangsa Indonesia terdiri dari keanekaragaman yang begitu kompleks.

Bhinneka Tunggal Ika mengungkapkan kerinduan akan kesatuan dari kepelbagaian dan dapat diidentifikasi di dalam pandangan dunia yang bersifat totalistis, dualistis dan hierarkhis (Hardono Hadi, 1994: 95; Eka Dharmaputera, 1992: 80-82).

Pandangan dunia yang bersifat totalistis artinya, semua unsur dalam semesta ini saling berhubungan satu sama lain, dan kesemuanya bermuara pada Allah yang merupakan asal dan tujuan dari segala sesuatu. Pandangan dunia yang bersifat dualistis artinya, penekanan pada prinsip keseimbangan antara kutub-kutub paradoksal (misalnya: kutub kesatuan dengan kutub kemajemukan). Pandangan dunia yang bersifat hierarkhis, menunjuk kepada pengaturan semesta menurut pembagian tempat yang tepat, sehingga menimbulkan suatu sistem kesatuan, di mana masing-masing unturnya mempunyai peranan yang tidak dapat diabaikan dalam konstelasi keseluruhan (Hardono Hadi, 1994: 95-96).

Pranarka (1985:721) menegaskan bahwa prinsip kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia yang termaktub dalam Bhinneka Tunggal Ika mengacu pada ideologi kebangsaan. Ideologi kebangsaan pada hakikatnya adalah cita-cita persatuan dan kesatuan kebangsaan yang tidak didasarkan kepada konotasi etnis, rasial, daerah, status sosial, kekuatan ekonomi, agama, ataupun kepercayaan, namun dari lain pihak juga bukan persatuan-kesatuan yang bermaksud mematikan kenyataan etnis, rasial, daerah, mematikan agama-agama ataupun kepercayaan. Ideologi kebangsaan kita itu melihat adanya interelasi dari kenyataan yang divergen dan majemuk, dan karena itu ditumbuhkanlah titik temu yang menyatukan dan mendamaikan.

Akhirnya keanekaragaman budaya bangsa Indonesia merupakan hal yang tak terbantahkan, namun kesatuan merupakan sebuah proses yang terlihat jelas dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Eka Dharmaputera mengibaratkan keadaan bangsa Indonesia itu dengan sebuah taman bunga, yang di dalamnya tumbuh berbagai jenis bunga yang beranekawarna. (Dharmaputera, 1992: 44-45). Taman bunga merupakan wadah untuk menampung keanekawarnaan bunga-bunga, sebagaimana halnya negara kebangsaan yang

menampung berbagai budaya daerah yang berkembang sedemikian rupa, sehingga membentuk kebudayaan nasional.

Kesimpulan

Pada akhirnya wawasan kebangsaan Indonesia secara substansial tidaklah menafikan kenyataan yang ada, termasuk perbedaan-perbedaan yang belakangan ini dipakai sebagai dalih bagi timbulnya konflik dalam kehidupan masyarakat. Namun akar permasalahan yang menimbulkan konflik itu sesungguhnya tidak semata-mata berangkat dari perbedaan yang bersifat alamiah seperti perbedaan etnis ataupun perbedaan budaya seperti bahasa, adat istiadat, dan lain-lain; melainkan lebih didasarkan pada perbedaan visi masyarakat dengan penguasa tentang masalah keadilan, kesejahteraan, politik, dan lain-lain. Perbedaan yang belakangan ini akan semakin meningkat frekuensinya pada abad mendatang, karena masyarakat semakin tercerdaskan oleh berbagai informasi yang mereka peroleh, sehingga masyarakat mempunyai pembandingan yang lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu pemerintah harus mampu menangkap aspirasi rakyat dan lebih peka terhadap suara-suara rakyat --bukan dalam arti formal dalam bentuk kelembagaan-- melainkan memahami fenomena kehidupan masyarakat secara langsung. Pekerjaan rumah terbesar dari pemerintah adalah pembukaan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat dapat hidup secara layak.

Pandangan Daoed Joesoef tentang tiga konsep tanah air yakni tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental menunjukkan bahwa selama ini kita baru menghayati dua bentuk tanah air, yaitu real dan formal. Kita merasa bahwa Indonesia lebih merupakan tempat kelahiran dan hidup sehari-hari. Kita merasa bahwa kita secara formal merupakan warganegara Indonesia yang harus menaati hukum yang berlaku. Namun kita belum menghayati bentuk tanah air ketiga, yakni tanah air mental, yang berupa imajinasi yang dibentuk oleh nilai-nilai ideologi. Sebab tanah air mental inilah sesungguhnya yang menjadikan kita mampu mengatasi segala perbedaan (etnik, agama, antar golongan). Penyatuan ketiga jenis tanah air dalam rangka mengembangkan semangat

kebangsaan merupakan tuntutan yang penting dalam menyongsong abad XXI agar bangsa Indonesia tidak mudah terpecah ke dalam serpihan kesukuan, keagamaan atau golongan.



DAFTAR PUSTAKA

- Ayatrohaedi (editor), 1986, *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Bakker, A., 1995, *Kosmologi & Ekologi: Filsafat Tentang Kosmos Sebagai Rumahtangga Manusia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Daed Joesoef., 1987, "Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan", dalam *Pancasila Sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu*, Editor: Soeroso H. Prawirohardjo, dkk, *Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta.
- Driyarkara., tt, *Pancasila Dan Religi*, tanpa penerbit.
- Eka-Dharmaputera, 1992, *Pancasila Identitas dan Modernitas*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Ewing, A.C., 1962, *The Fundamental Questions of Philosophy*, Collier Books, New York.
- Hardono Hadi, 1994, *Hakikat & Muatan Filsafat Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Haryati Soebadio, 1992, *Budaya Lampau sebagai Pijakan Orientasi Budaya Masa Depan*, Departemen Sosial, Yogyakarta.
- Ingleson, J., 1993, *Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan*, Penerjemah: Nina Bakdisoemanto, *Pustaka Utama Grafiti*, Jakarta.
- Jujun S Suriasumantri, 1987, "Pembangunan Sosial Budaya Secara Terpadu", dalam *Masalah Sosial Budaya Tahun 2000*, Cetakan Kedua, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1975, *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*, cetakan kedua, Gramedia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1993, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Cetakan Keempatbelas, Penerbit Djambatan, Jakarta.

- Koentjaraningrat, 1985, "Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional", dalam Alfian (ed), *Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan*, Gramedia, Jakarta.
- Koento Wibisono, 1985, *Ilmu Filsafat dan Aktualitasnya dalam Pembangunan Nasional; Suatu Tinjauan dari Sudut Tradisi Pemikiran Barat*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Koesnadi Hardjasumantri, *Jurnal Pusat Studi Pancasila*, seri I tahun 1997, Diterbitkan oleh PSP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Notonagoro, 1987, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Cetakan Ketujuh, Bina Aksara, Jakarta.
- Poerwadarminta, WJS., 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Pranarka, A.M.W., 1985, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, CSIS, Jakarta.
- Pranarka, A.M.W., 1985, "Kesenambungan, Penataan, dan Ideologi", dalam *Analisa*, tahun 1985-9, CSIS, Jakarta.
- Prent, dkk, 1969, *Kamus Latin-Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta.
- Quirk, R., 1987, *Longman Dictionary of Contemporary English*, Second Edition, Longman Group UK Limited, England.
- Runes, D., 1979, *Dictionary of Philosophy*, Littlefield Adams & Co, Totowa, New Jersey.
- Sartono Kartodirdjo, 1994, *Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional*, Aditya Media, Yogyakarta.
- Soeprapto, 1995, "P-4 Sebagai Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara", dalam *Jurnal Filsafat*, seri 22, Agustus, 1995, Penerbit Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soerjanto Poespowardojo., 1993, *Pembangunan Nasional Dalam Perpektif Budaya; Sebuah Pendekatan Filsafat*, Gramedia, Jakarta.
- Soerjanto Poespowardojo, 1995, "Cita Negara Integralistik dan Pandangan Baruch De Spinoza, Adam Muller dan Friedrich Hegel", dalam *Cita Negara Persatuan Indonesia*, disunting oleh: Soeprapto-Saafroedin Bahar-Ismail Arianto, BP-7 Pusat, Jakarta.

Toety Heraty Noerhadi, 1992 *Ilmu Pengetahuan Dalam Konteks Tradisi Modernisme dan Pascamodernisme*, Pidato Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Indonesia XLIII, Jakarta.

Tommy Awuy., 1997, "Tentang Diskursus HAM Yang Berubah", dalam *Jurnal Dinamika HAM*, Vol. I, No. 01 Mei-Oktober 1997, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya Bekerja Sama Dengan Gramedia Pustaka Utama, Surabaya.